



EVALUASI KEBERHASILAN PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA TERKAIT DENGAN PENDANAAN DANA DESA KABUPATEN PURBALINGGA

EVALUATION OF SUCCESS OF IMPLEMENTATION OF VILLAGE INFRASTRUCTURE RELATED TO FUNDING PURBALINGGA REGENCY

Abdullah Luthfi¹, Ismiyati², Ferry Hermawan²

¹Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga; adullahluthfi1980@gmail.com

²Departemen Teknik Sipil; Universitas Diponegoro; ismi.quensha@gmail.com; hermawan.ferry@gmail.com

Info Artikel:

• ArtikelMasuk: 28 Maret 2019

• Artikel diterima: 29 Mei 2019

• TersediaOnline: 30 Maret 2020

ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan Dana Desa menjadikan perubahan yang sangat signifikan, desa yang dulunya mendapatkan anggaran yang sangat terbatas yang dikelola secara terpusat oleh instansi pemerintah di atasnya kini desa mendapatkan anggaran yang cukup besar dan diberi kewenangan mengelola secara mandiri. Dana Desa untuk pembangunan fisik yang terealisasi tahun 2015, 2016 dan 2017 yang dirasakan secara transparan, kurang memenuhi kualitas infrastruktur dalam menunjang sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan infrastruktur jalan desa terkait dengan pendanaan dana desa. Lokasi Penelitian ini di Desa Gondang, Desa Kertanegara dan Desa Karanggambas Kabupaten Purbalingga. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan metode kuantitatif dan kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perencanaan desa di lokasi penelitian belum sepenuhnya sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, (2) tingkat kerusakan jalan 2015 terbesar di Desa Karanggambas (16,94%), tingkat kerusakan jalan 2016 dan 2017 terbesar di Desa Gondang (10,73% dan 17,77%) (3) komitmen dan kualitas SDM mempengaruhi keberhasilan implementasi perencanaan dan pembangunan infrastruktur, (4) Pelaksanaan Dana Desa dari sisi manfaat sudah dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur, tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya dikatakan berhasil, (5) tingkat pemeliharaan kerusakan infrastruktur jalan desa masih rendah.

Kata Kunci : Dana Desa, Evaluasi, Infrastuktur, Jalan Desa

ABSTRACT

The implementation of the Village Fund policy made a very significant change, the villages which had previously received a very limited budget were managed centrally by government agencies on top of which villages now get a substantial budget and are given the authority to manage independently. Village Funds for physical development realized in 2015, 2016 and 2017 that are felt transparently, do not meet the quality of infrastructure in supporting facilities and infrastructure. This study aims to evaluate the successful implementation of village road infrastructure related to village funding. The location of this research is Gondang Village, Kertanegara Village and Karanggambas Village, Purbalingga Regency. The data analysis technique used is data analysis with quantitative and qualitative methods with steps of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study show that (1) Village planning in the research location is not fully in accordance with Permendagri Number 114 of 2014, (2) the highest level of road damage in Karanggambas Village (16.94%), the biggest 2016 and 2017 road damage in the village Gondang (10.73% and 17.77%) (3) commitment and quality of human resources affect the successful implementation of infrastructure planning and development, (4) Implementation of Village Funds in terms of benefits has been felt by the community in meeting basic infrastructure needs, but not fully implemented. said to be successful, (5) the level of maintenance of damage to village road infrastructure is still low.

Keyword: Village Funds, Evaluation, Infrastructure, Village Roads

1. PENDAHULUAN

Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Besarnya Dana Desa yang diberikan kepada semua desa, termasuk yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga maka besar pula harapan akan terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan partisipatif. Pelaksanaan kebijakan Dana Desa menjadikan perubahan yang sangat signifikan, desa yang dulunya mendapatkan anggaran yang sangat terbatas yang dikelola secara terpusat oleh instansi pemerintah di atasnya kini desa mendapatkan anggaran yang cukup besar dan diberi kewenangan mengelola secara mandiri. Akan tetapi dalam perjalanannya Dana Desa yang dimulai sejak tahun 2015 memunculkan keraguan akan kemampuan desa dalam melaksanakan kebijakan ini. Terlebih lagi desa masih banyak memiliki keterbatasan tertentu terutama dalam hal sumber daya manusia pengelolanya yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan Dana Desa.

Ada masalah dalam pengelolaan dana desa dan merancang bangun desa yang kerap menjadi kekhawatiran banyak pihak. Pertama, implementasi UU Desa belum sepenuhnya dipahami oleh para elite di desa. Kombinasi azas rekognisi yang termaktub dalam UU Desa telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah desa dalam mengatur kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa, hak usul, kearifan lokal, juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik (<http://aceh.tribunnews.com/2017/10/25/jalan-baru-pembangunan-desa>, 2017).

Dana pembangunan fisik yang terealisasi beberapa tahun terakhir pada tahun 2017 dan perkembangan pembangunan fisik dari tahun 2015 dan 2016 bahwa lingkup masalah pembangunan yang dirasakan secara transparan, kurang memenuhi kualitas infrastruktur dalam menunjang sarana dan prasarana. Masalah efektifitas dana yang menonjol pada tahun 2017 adalah pembangunan jalan aspal desa Gondang sumber dana dari Dana Desa, karena realisasi dilapangan dengan bentuk nyata sarana fisik sudah rusak sehingga perlu diperbaiki. Padahal pembangunan sarana fisik tersebut baru selesai dibangun Desember 2017, tetapi pada realitanya hanya berjalan beberapa bulan saja sudah terjadi kerusakan.

Dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan tersebut di atas bahwa Dana Desa ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur perdesaan untuk memperlancar transportasi dan meningkatkan perekonomian kawasan perdesaan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi kondisi pelaksanaan infrastruktur jalan desa yang didanai Dana Desa.

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya Suparman et al. (2014) mendeskripsikan proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dilihat dari faktor Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana, faktor sosialisasi penyaluran dana dan faktor koordinasi. Agustin et al. (2015) menyatakan bahwa efektifitas dana pembangunan fisik dikatakan efektif karena target dan realisasi dana yang sudah ditentukan tidak mengalami pengembangan, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan fisik tersebut masyarakat kurang merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang tidak memenuhi masa yang cukup panjang tidak lebih dari satu tahun jalan tersebut rusak. Milanti (2016) mendeskripsikan evaluasi pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo pada tahun 2015 terkait partisipasi masyarakat, pemanfaatan SDM yang ada dan kesesuaian usulan kegiatan terhadap kebutuhan masyarakat. Sanusi et al. (2014) menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Sedang Kogoya, et al. (2015) menyatakan perlunya mempertahankan keaktifan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan desa pada

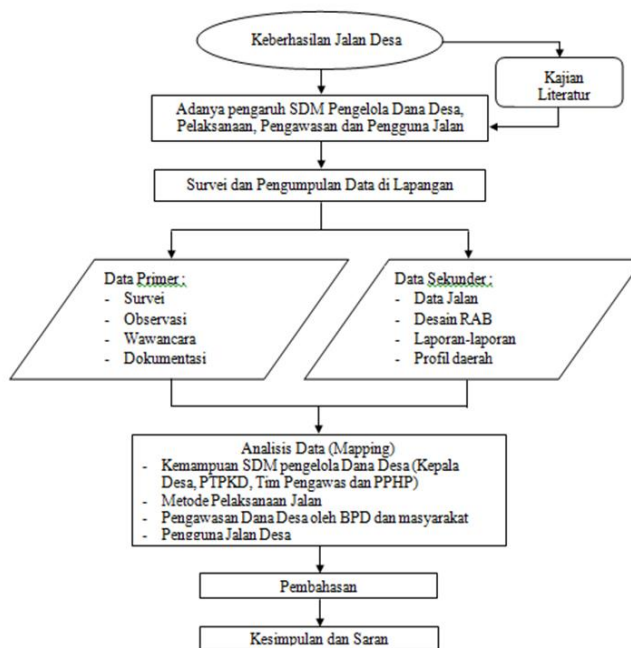
tahap perencanaan dan pelaksanaan serta perlunya peningkatan kesadaran dari masyarakat untuk memelihara infrastruktur yang sudah dikerjakan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus dalam penelitian ini adalah mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan infrastruktur jalan desa terkait dengan pendanaan Dana Desa, mengkaji kesesuaian perencanaan desa terhadap kebutuhan masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014, mengetahui kondisi infrastruktur desa yang bersumber dari Dana Desa, serta sejauh mana pemeliharaan infrastruktur yang sudah dilaksanakan oleh desa. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan metode kuantitatif dan kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih kepada Pemerintah atau Pemda setempat dalam mengevaluasi sekaligus pengendalian implementasi penyelenggaraan Dana Desa dan bagi Pemerintah Desa sebagai input bagaimana memelihara kegiatan jalan desa agar tetap dalam kondisi baik.

2. DATA DAN METODE

2.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menghitung analisa prosentase kerusakan jalan, sedangkan metode kualitatif dalam rangka mendapatkan analisa yang lebih mendalam mengenai realita yang terjadi di lapangan. Metode kualitatif lebih mudah dalam melakukan penyesuaian apabila dihadapkan pada kenyataan ganda, dan dapat menyajikan secara langsung interpretasi peneliti dan responden sendiri selain peka lebih peka dan adaptif dengan berbagai pengaruh yang teijadi terhadap pola, aspek, atau nilai yang dihadapi secara empirik (Moleong, 2006).



Sumber: Hasil analisis, 2019

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti melakukan survei, observasi, kuesioner dan wawancara mendalam (in-depth interview) untuk mendapatkan data primer dan teknik dokumentasi dengan menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Milles dan

Huberman dalam Sugiono (2009) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, seperti dapat dilihat pada pada **Gambar 1**.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif adalah sebagai berikut :

1. Mensurvei dan mengobservasi kondisi infrastruktur peningkatan jalan yang dibangun oleh Dana Desa tahun 2015, 2016 dan 2017.
2. Melakukan kuesioner dengan Sekretaris Desa sesuai pedoman kuesioner yang telah dibuat.
3. Melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, Penanggung jawab teknis pekerjaan konstruksi, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Badan Permusyawaratan Desa dan perwakilan masyarakat pemanfaat langsung sesuai pedoman wawancara yang telah dibuat.
4. Mengkategorikan catatan-catatan yang diambil dari sumber data lalu mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang sama.
5. Mengkategorikan kategori yang telah disusun dan dihubungkan dengan kategori lainnya sehingga hasilnya akan diperoleh susunan yang sistematis dan berhubungan satu sama lain.
6. Menelaah relevansi data dengan cara mengkaji susunan pembicaraan yang sistematis dan relevansinya serta tujuan penelitian.
7. Melengkapi data dengan cara mengkaji isi data baik berupa hasil observasi, hasil wawancara, hasil kuesioner serta hasil dokumentasi lapangan.
8. Menjadikan jawaban, maksudnya adalah hasil kajian data kemudian dijadikan jawaban setelah dianalisis.
9. Menyusun laporan, setelah menjabarkan jawaban secara terperinci.

Teknik Analisis Kerusakan Infrastruktur Jalan menggunakan Penilaian kondisi permukaan jalan dilakukan dengan metode Bina Marga. Pada metode Bina Marga (BM) ini jenis kerusakan yang perlu diperhatikan saat melakukan survai adalah retak (cracking), distorsi (distortion), cacat permukaan (disintegration), pengausan (polished agregat), kegemukan (bleeding or flushing) dan penurunan pada bekas penanaman utilitas (utility cut depression). Penentuan nilai prosentase kerusakan jalan adalah luas kondisi kerusakan permukaan terhadap luas total permukaan jalan.

Dari hasil perhitungan prosentase kerusakan, maka dapat ditentukan penanganan pemeliharaan jalan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan sebagaimana **Tabel 1**. dibawah ini.

Tabel 1. Tabel Penentuan Program Penanganan Pemeliharaan Jalan Berpenutup Aspal/Beton Semen

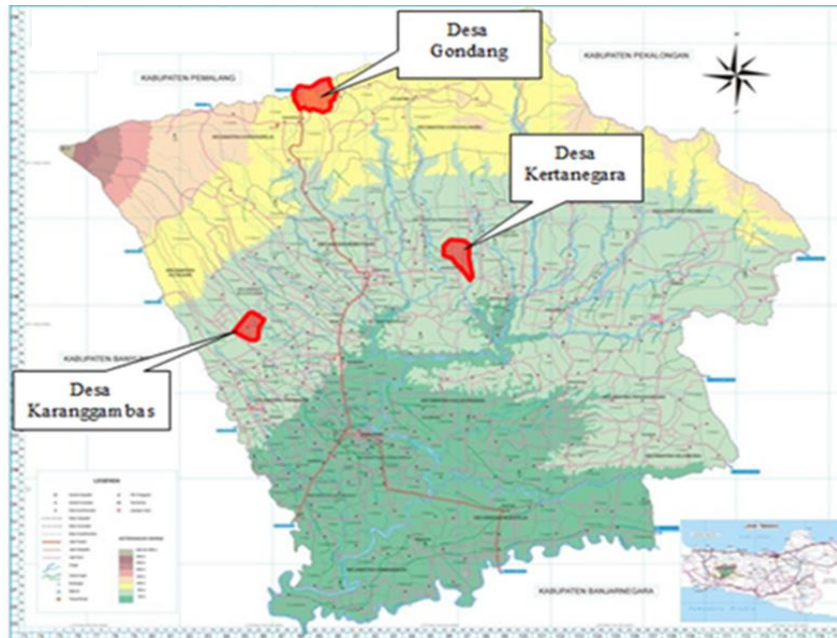
Kondisi Jalan	Prosentase Kerusakan (% terhadap Luas Lapis Perkerasan Permukaan)	Program Penanganan
Baik (B)	< 6%	Pemeliharaan Rutin
Sedang (S)	6 - < 11 %	Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Rusak Ringan (RR)	11 - < 15 %	Pemeliharaan Rehabilitasi
Rusak Berat (RB)	> 15 %	Rekonstruksi/Peningk. Struktur

Sumber : Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan (2011)

2.2. Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi di Lokasi Penelitian

Desa Gondang sesuai data GPS terletak pada 7,220700 ; 109,351900 dalam wilayah Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Desa Kertanegara sesuai data GPS terletak pada -7,334550 ; 109,431342 dalam wilayah Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Desa Karanggambas sesuai data GPS terletak pada 7,3649 ; 109,3070 dalam wilayah Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Adapun peta lokasi penelitian terlihat sebagaimana pada Gambar 2.

Dilihat dari luas wilayah, Desa Gondang merupakan desa yang paling luas wilayah administratifnya dibanding Desa Kertanegara (185,220 Ha) dan Desa Karanggambas (120,750 Ha) yaitu seluas 561,87 Ha, sehingga kebutuhan akses infrastruktur Desa termasuk jalan Desa, Desa Gondang lebih banyak jumlah daripada Desa Kertanegara dan Desa Karanggambas. Untuk penggunaan lahan ketiga lokasi penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 2.



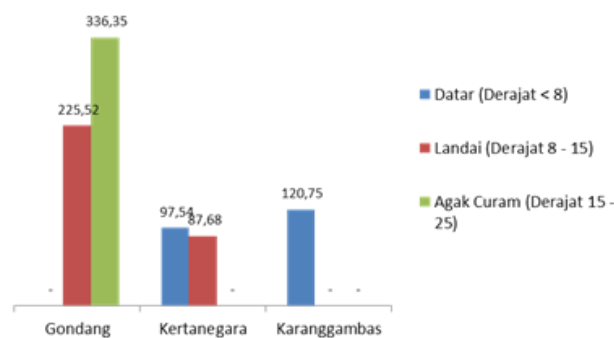
Sumber: BPS kabupaten Purbalingga, 2018

Gambar 2. Peta Lokasi penelitian

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Desa dan Penggunaannya (Ha)

No	Lahan	Gondang	Kertanegara	Karanggambas
1	Sawah	45,650	89,790	94,830
2	Pekarangan/ Bangunan	49,450	40,063	6,660
3	Tegal/ Kebun	367,940	39,056	10,760
4	Tambak/ Kolam	0,030	-	0,220
5	Hutan Negara	69,000	-	-
6	Lain Lain	29,800	16,311	8,280
	Jumlah	561,870	185,220	120,750

Sumber: BPS kabupaten Purbalingga, 2018



Sumber: Bappelitbangda Purbalingga, 2017

Gambar 3. Luas Wilayah Kemiringan Lereng Lokasi penelitian (Ha)

Dilihat dari kondisi kemiringan lereng, wilayah Desa Gondang merupakan desa yang paling landai dan agak curam dibanding Desa Kertanegara dan Desa Karanggambas, sehingga trase infrastruktur Jalan Desa di Desa Gondang kemiringannya landai dan agak curam juga. Dengan kondisi jalan yang landai dan agak curam, dibandingkan dengan kondisi jalan yang datar tingkat kerusakan jalan akan lebih cepat jika tidak diperhatikan perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur jalan. Untuk kondisi kemiringan lereng ketiga lokasi penelitian ini bisa dilihat pada Gambar 3.

Dilihat dari segi sosial ekonomi penduduk Desa Gondang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, buruh tani dan buruh industri. Desa Kertanegara sebagian besar mata pencahariannya adalah pedagang, buruh bangunan, buruh industri, buruh tani, petani dan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Desa Karanggambas sebagian besar mata pencahariannya adalah buruh industri, buruh tani dan buruh bangunan.

Kegiatan peningkatan jalan desa di Desa Gondang selama 3 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2017 telah terbangun jalan sepanjang 3.330 m dengan lebar antara 2,5m sampai 3,25m dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 1.093.545.986,- dengan konstruksi jalan dari perkerasan lapen+shansheet sebagaimana terinci dalam Tabel 3 dan Gambar 4.

Tabel 3. Daftar Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Gondang (Hasil analisis, 2019)

No	Tahun	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Volume
1	2015	Pembangunan Aspal Dusun I	212.129.800	870 m x 2,5 m
		Pembangunan Aspal Dusun II	85.621.200	225 m x 3,25 m
2	2016	Pembangunan Aspal RT. 5,6 RW. 2	199.588.500	1035 m x 2,5 m
		Pembangunan Aspal RT. 6/1 - RT. 4/4	138.408.986	870 m x 2,5 m
3	2017	Pembangunan Aspal Dusun I RT.7-4 RW.1	110.043.000	250 m x 1,7 m
		Pembangunan Aspal Dusun II RT.2 RW.3	242.843.200	670 m x 2,5 m
		Pembangunan Aspal Dusun II RT.6 RW.4	30.614.300	100 m x 2,5 m
		Pembangunan Aspal Dusun II RT.5 RW.2	74.297.000	180 m x 2,5 m

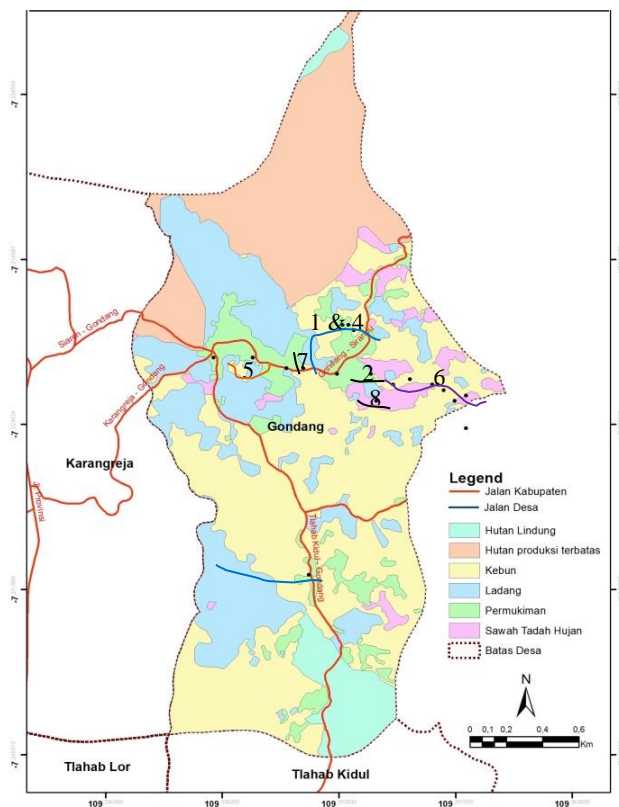
Sumber: Hasil analisis, 2019

Kegiatan peningkatan jalan desa di Desa Kertanegara selama 2 tahun terakhir, tahun 2016 dan tahun 2017 telah terbangun jalan konstruksi perkerasan lapen+shansheet sepanjang 659 m, lebar jalan 2,4m sampai 2,8m, konstruksi jalan rabat beton sepanjang 1.652,5 m, lebar jalan 1,0m sampai 2,0m dengan menghabiskan total dana sebesar Rp. 437.243.700,- sebagaimana terinci dalam Tabel 4 dan Gambar 5. Pada tahun 2015 di Desa Kertanegara, anggaran Dana Desa tidak ada kegiatan peningkatan jalan.

Tabel 4. Daftar Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Desa Kertanegara

No	Tahun	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Volume
1	2016	Jalan Rabat Beton Dusun II, III	132.732.300	945 m x 1,0 m 168 m x 2,0 m
2	2017	Jalan Rabat Beton Rt. 3/1 (Pawoto-Timur)	8.108.200	85 m x 1,0 m
		Jalan Rabat Beton Rt. 3/1 (Udin-Selatan)	5.222.000	45 m x 1,0 m
		Jalan Rabat Beton Rt. 1/2 (Timur-R. Yantono)	8.252.500	72,5 m x 1,2 m
		Jalan Rabat Beton Rt. 2/3 (Maesatun-Ke Barat)	19.654.000	99 m x 2,0 m
		Jalan Rabat Beton Rt. 3-4/3 (Masjid-SDN 2)	27.516.600	195 m x 1,8 m
		Jalan Rabat Beton Rt. 4/3 (Budidarmawan)	5.623.200	43 m x 1,2 m
		Jalan Aspal Rt. 3/5	197.002.900	551 m x 2,8 m
		Jalan Aspal Rt. 4/4	33.132.000	108 m x 2,4 m

Sumber: Hasil analisis, 2019



Keterangan :

2015 :

1. Pembangunan Aspal Dusun I
2. Pembangunan Aspal Dusun II

2016 :

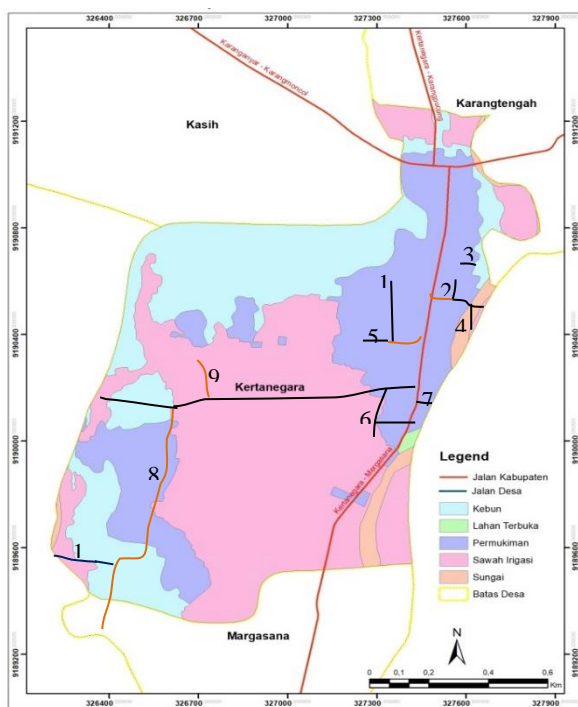
3. Pembangunan Aspal RT. 5,6 RW. 2
4. Pembangunan Aspal RT. 6/1 - RT. 4/4

2017:

5. Pembangunan Aspal Dusun I RT.7-4 RW.1
6. Pembangunan Aspal Dusun II RT.2 RW.3
7. Pembangunan Aspal Dusun II RT.6 RW.4
8. Pembangunan Aspal Dusun II RT.5 RW.2

Sumber: Hasil analisis, 2019

Gambar 4. Peta Jaringan Jalan dan Penggunaan Lahan Desa Gondang



Keterangan :

2016:

1. Jalan Rabat Beton Dusun II, III

2017 :

2. Jalan Rabat Beton RT. 3/1 (Pawoto-Timur)
3. Jalan Rabat Beton RT. 3/1 (Udin-Selatan)
4. Jalan Rabat Beton RT. 1/2 (Timur-R. Yantono)
5. Jalan Rabat Beton RT. 2/3 (Maesatun-KeBarat)
6. Jalan Rabat Beton RT. 3-4/3 (Masjid-SDN 2)
7. Jalan Rabat Beton RT. 4/3 (Budidarmawan)
8. Jalan Aspal RT. 3/5
9. Jalan Aspal RT. 4/4

Sumber: Hasil analisis, 2019

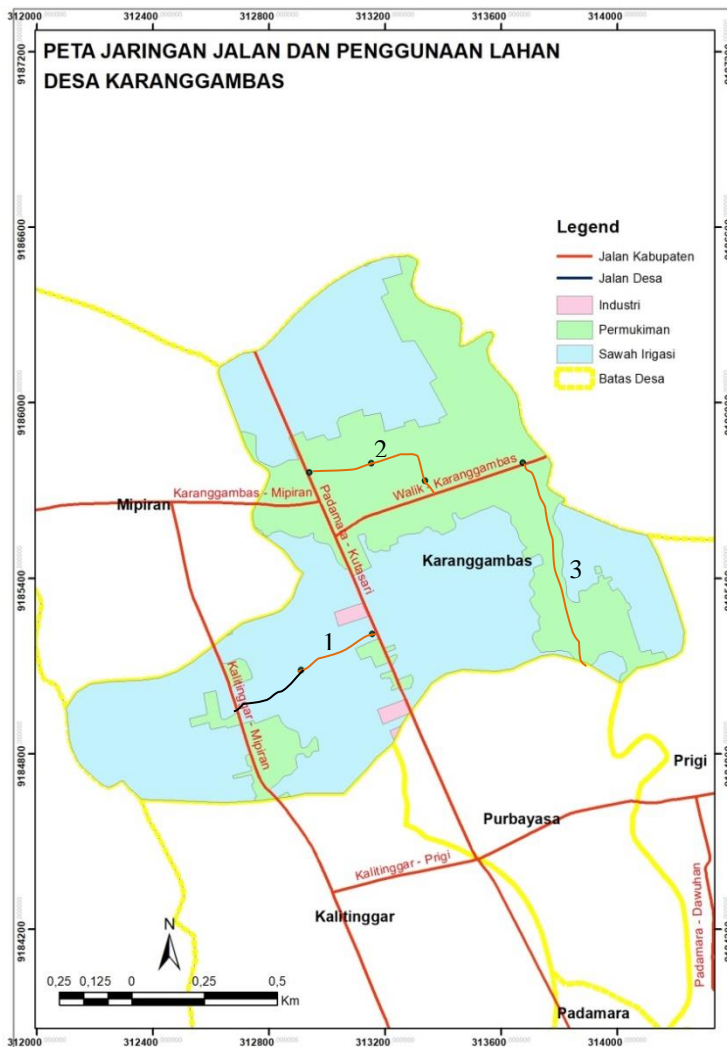
Gambar 5. Peta Jaringan Jalan dan Penggunaan Lahan Desa Kertanegara

Kegiatan peningkatan jalan desa di Desa Karanggambas selama 3 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2017 telah terbangun jalan sepanjang 1.469 m dengan lebar antara 2,5m sampai 3,0m dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 423.381.300,- dengan konstruksi jalan dari perkerasan lapen+shansheet sebagaimana terinci dalam Tabel 5. dan Gambar 6.

Tabel 5. Daftar Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Desa Karanggambas

No	Tahun	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Volume
1	2015	Pembangunan Jalan Karangkanti	132.732.300	294 m x 3,0 m
2	2016	Pengaspalan Jalan Rt. 1/1 dan Rt. 2/4	125.843.000	150 m x 3,0 m 350 m x 2,5 m
3	2017	Pengaspalan Jalan Rw.01 Dusun I	164.806.000	675 m x 3,0 m

Sumber: Hasil analisis, 2019



Keterangan :

2015 :

1. Pembangunan Jalan Karangkanti

2016 :

2. Pengaspalan Jalan RT. 1/1 dan RT. 2/4

2017 :

3. Pengaspalan Jalan RW.01 Dusun I

Sumber: Hasil analisis, 2019

Gambar 6. Peta Jaringan Jalan dan Penggunaan Lahan Desa Karanggambas

Tabel 6. Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan

No	Kelengkapan Dokumen	Gondang			Kranggambas			Kertanegara		
		Ada		TA	Ada		TA	Ada		TA
		L	K		L	K		L	K	
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa			V			V			V
2	Data Desa (Daftar SDA, SDM, SDPembangunan, SDSosbud)		V			V				V
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat			V			V	V		
4	Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa		V			V				V
5	Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa	V				V				V
6	Rancangan RPJM Desa	V				V				V
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa			V			V	V		
8	Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa	V				V				V
9	Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa	V				V				V
10	Pagu indikatif Desa	V				V				V
11	Daftar usulan RKP Desa	V				V				V
12	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa			V			V			V
13	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa			V			V			V

Keterangan L=Lengkap, K=Kurang, TA=Tidak Ada

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Tahap Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam tahap Perencanaan Pembangunan Desa, penulis mengacu yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam Permendagri ini disebutkan bahwa dalam penyusunan Pembangunan Desa harus melakukan usulan rencana kegiatan desa yang berdasarkan dari gagasan masyarakat terkecil, pengkajian keadaan desa menggunakan sketsa Desa kalender musim dan bagan kelembagaan Desa dengan melihat potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan beberapa musyawarah di tingkat desa, seperti musyawarah rancangan RPJMDes, musyawarah penyusunan RPJMDes, musyawarah rancangan RKP dan musyawarah penyusunan RKP. Dalam musyawarah rancangan ataupun penyusunan RPJMDes dan RKP seharusnya Desa sudah mendapatkan Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dari anggaran APBD maupun APBN. Hasil analisis berdasarkan pemeriksaan dokumen Perencanaan Desa didapatkan sesuai Tabel 6.

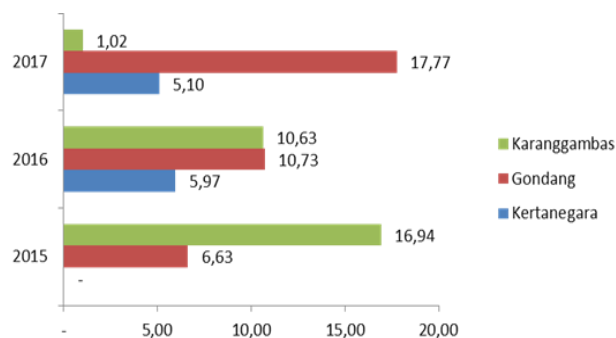
Dalam dokumen RPJMDes Desa Gondang Tahun 2014-2019 ternyata tidak dilakukan penggalian gagasan kumpulan tingkat RT, RW ataupun Dusun dan hanya berupa usulan tanpa menggunakan sketsa Desa kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tetapi dilakukan secara non formal hanya di beberapa pertemuan tingkat RT saat ada kegiatan kemasyarakatan, itupun tidak dilakukan secara tertulis tanpa ada dokumentasi. Penyusunan RPJMDes 2014-2019 dan RKP (2015, 2016, 2017) di Desa Gondang langsung dilakukan di tingkat desa melalui musrenbangdes. Proses rancangan RPJMDes dan RKP tidak dilakukan di Desa Gondang.

Dalam dokumen RPJMDes Desa Kertanegara Tahun 2014-2019 dilakukan penggalian gagasan menggunakan sketsa Desa kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Hanya saja dilakukan bebarengan saat lokakarya Desa pada tahun 2013 dengan menghadirkan perwakilan masing masing RT. Di lokakarya tersebut setiap perwakilan menyampaikan usulan kegiatan fisik dan fisik berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki. Penyusunan RPJMDes 2014-2019 Desa Kertanegara dilakukan melalui muswarah dengan mengambil basic data hasil lokakarya ini. Untuk RKP (2015, 2016, 2017) di Desa Kertanegara langsung dilakukan di tingkat desa melalui musrenbangdes dengan melalui tahapan musyawarah rancangan RKP.

Sedang dokumen RPJMDes Desa Karanggambas Tahun 2014-2019 ternyata tidak dilakukan penggalian gagasan menggunakan sketsa Desa kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tetapi dilakukan secara langsung di tingkat desa. Begitu juga dengan RKP (2015, 2016, 2017) di Desa Karanggambas langsung dilakukan di tingkat desa melalui. Proses rancangan RPJMDes dan RKP tidak dilakukan oleh Desa Karanggambas.

3.2. Analisis Tingkat Kerusakan Infrastruktur Peningkatan Jalan desa dengan Pendanaan Dana Desa

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada permukaan pembangunan peningkatan jalan di lokasi penelitian TA 2015, 2016 dan 2017, didapat jenis-jenis kerusakan yang terjadi, yaitu kerusakan Lubang (Pothole), Pelapukan dan Butiran Lepas (Weathering and Raveling), Amblas (Grade Depression), Alur (Ruts), Retak Memanjang dan Melintang (Long and Trans Cracking), Retak Kulit Buaya (Alligator Cracking), Retak Pinggir (Edge cracking) dan Jembul (upheaval). Hasil pengukuran prosentase rerata kerusakan permukaan peningkatan jalan desa sebagaimana pada Gambar 7.



Sumber: Hasil analisis, 2019

Gambar 7. Prosentase Rerata Kerusakan Peningkatan Jalan Desa di Lokasi Penelitian

Kerusakan peningkatan jalan desa pada tahun 2015, terparah ada di Desa Karanggambas, ruas Jalan Karanganti sebesar 149,39 m² atau 16,94% dari luas total 882 m². Jenis kerusakan di dominasi pelapukan dan butiran lepas (47,36%), kerusakan alur (13,72%) dan lubang (12,58%) dari total luas kerusakan. Dari kerusakan yang terjadi sepanjang ruas jalan tersebut menyebabkan sangat tidak nyamannya pengendara menggunakan jalan tersebut. Hal ini terjadi akibat dari beban yang lewat melebihi tonase yang diijinkan sebesar 8ton (kelas III). Di titik akhir jalan karangjati ada lokasi pembuangan limbah pabrik kayu, dimana tiap harinya selalu lewat truk yang melebihi kapasitas muatan > 8ton. Selain itu kerusakan-kerusakan yang tidak segera ditangani, pengaruh cuaca (terutama hujan) dan disebabkan oleh kurangnya dukungan dari arah lateral (dari bahu jalan), drainase jalan yang tidak ada serta kembang susut tanah di sekitarnya.

Kerusakan peningkatan jalan desa pada tahun 2016 terparah ada di Desa Gondang sebesar 10,73%. Ada 2 ruas jalan yang terbangun pada tahun 2016 di Desa Gondang. Dari 2 ruas yang terbangun, kerusakan terbesar pada ruas jalan RT. 6/1 - RT. 4/4 sebesar 247,10 m² atau 11,36 % dari luas total 2.175 m². Jenis kerusakan di dominasi pelapukan dan butiran lepas (69,95%), kerusakan retak kulit buaya (13,40%) dan jembul (4,05%) dari total luas kerusakan. Dari kerusakan yang terjadi sepanjang ruas jalan tersebut

menyebabkan sangat tidak nyamannya pengendara menggunakan jalan tersebut. Hal ini terjadi akibat dari pelaksanaan jalan aspal yang kurang sesuai spesifikasi padahal lokasi kegiatan ada di lokasi yang kemiringan jalannya curam, sistem drainase jalan yang tidak baik yang menyebabkan naiknya air dengan sifat kapilaritas.

Kerusakan peningkatan jalan desa pada tahun 2017 terparah ada di Desa Gondang sebesar 17,77%. Ada 4 ruas jalan yang terbangun pada tahun 2017 di Desa Gondang. Dari 4 ruas yang terbangun, kerusakan terbesar pada ruas Dusun I RT.7-4 RW.1 sebesar 130,86 m² atau 30,79% dari luas total 425 m². Jenis kerusakan di dominasi pelapukan dan butiran lepas (72,21%), kerusakan retak kulit buaya (10,32%) dan jembul (4,05%) dari total luas kerusakan. Adapun kerusakan Jalan di 3 lokasi tersebut ditunjukkan pada **Gambar 8**.



Sumber: Hasil analisis, 2019

Gambar 8. Kerusakan Jalan Karanganti Desa Karanggambas, Kerusakan Jalan RT. 6/1 - RT. 4/4 Desa Gondang dan Kerusakan Jalan Dusun I RT.7-4 RW.1 Desa Gondang

3.3. Analisis Pengaruh Interaksi Para Pihak Pengelola Dana Desa Terhadap Kesuksesan Implementasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Infrastruktur

Kesuksesan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, tidak bisa lepas dari komitmen dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Desa. Semakin tinggi komitmen pelaku dana desa dan masyarakat dalam menjalankan fungsinya, semakin baik hasil kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hubungan Para Pihak Pengelola Dana Desa Terhadap Kesuksesan Implementasi Perencanaan dan Pelaksanaan Infrastruktur

	Desa Gondang	Desa Karanggambas	Desa Kertanegara
Tingkat Kerusakan Jalan	Tahun 2015 6,63%, Tahun 2016 10,73%, Tahun 2017 17,77%	Tahun 2015 16,4%, Tahun 2016 10,63%, Tahun 2017 1,02%	Tahun 2016 5,97%, Tahun 2016 5,10%.
1. Kepala Desa	- Tidak adanya pembagian tupoksi, karena menjadi pelaksana sekaligus pengendali pelaksanaan kegiatan fisik - Tidak memfasilitasi semua pelaku Dana Desa berfungsi sesuai tupoksinya - Kurang mengerti perencanaan dan pelaksanaan jalan sesuai spesifikasi	Adanya pembagian tupoksi semua pelaku Dana Desa berfungsi sesuai tupoksinya. - Kurang memantau perkembangan pelaksanaan Dana Desa - Kurang mengerti perencanaan dan pelaksanaan jalan sesuai spesifikasi	Adanya pembagian tupoksi semua pelaku Dana Desa berfungsi sesuai tupoksinya. - Selalu memantau perkembangan pelaksanaan Dana Desa - Kurang mengerti perencanaan dan pelaksanaan jalan sesuai spesifikasi
2. PTPKD	- Tidak berfungsi sesuai tupoksi	- Berfungsi sesuai tupoksi	- Berfungsi sesuai tupoksi
3. BPD	- Fungsi pengawasan tidak berjalan - Kurang mengerti perencanaan dan pelaksanaan jalan aspal	- Fungsi pengawasan berjalan - Kurang mengerti perencanaan dan pelaksanaan jalan aspal	- Fungsi pengawasan berjalan - Kurang mengerti perencanaan dan pelaksanaan jalan aspal
4. PPHP	- Tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan - Kurang mengerti perencanaan dan pelaksanaan jalan aspal	- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan - Kurang mengerti perencanaan dan pelaksanaan jalan aspal	- Tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan - Kurang mengerti perencanaan dan pelaksanaan jalan aspal
5. Masyarakat	- Tidak melakukan pengawasan di lapangan - Tidak dilibatkan pada saat pelaksanaan pekerjaan jalan dimulai sampai selesai	- Melakukan pengawasan di lapangan - Tidak terlibat pada saat pelaksanaan pekerjaan jalan aspal. - Selain Pekerjaan aspal, dilaksanakan oleh masyarakat	- Terlibat dalam pengawasan di lapangan - Terlibat sebagai tenaga hampar spli di pekerjaan aspal - Selain Pekerjaan aspal, dilaksanakan oleh masyarakat

Sumber: Hasil analisis, 2019

3.4. Analisis Assesment Keberhasilan Dana Desa

Keberhasilan pelaksanaan Dana Desa, penulis merujuk pada indikator yang dipergunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di <http://pemdeswonosobo.blogspot.com/2009/04/alokasi-dana-desa.html> (2009) yang memiliki 7 indikator keberhasilan yaitu 1) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya, 2) meningkatnya partisipasi masyarakat mulai dari Musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa, 3) terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa, 4) meningkatnya swadaya masyarakat, 5) penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa semakin meningkat, 6) kelompok masyarakat penerima manfaat semakin meningkat jumlahnya dan 7) terjadi peningkatan pendapatan asli desa.

Pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya yang belum merata ke warga. Dikarenakan minimnya media sosialisasi yang dilakukan oleh Desa. Hal ini terjadi di Desa Gondang, masyarakat tidak mengetahui secara persis penggunaan Dana tersampaikan Desa. Pelaku desa (PTPKD,

PPHP dan BPD) tidak berfungsi maksimal dalam pelaksanaan dana desa TA. 2015, 2016 dan 2017. Pekerjaan infrastruktur dilaksanakan dibawah kendali Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Desa Karanggambas, pelaksanaan infrastruktur jalan desa TA 2015 juga dilaksanakan oleh pihak ketiga. Tetapi pelaksanaan infrastruktur TA 2016 dan 2017 sudah dilaksanakan secara swakelola. Untuk desa Kertanegara, mulai TA. 2015, 2016 dan 2017 semua pelaku desa secara umum berfungsi sesuai tupoksinya.

Meningkatnya partisipasi masyarakat mulai dari Musrenbang desa, hal ini diketahui dari tingkat kehadiran masyarakat. Semua unsur masyarakat terwakili saat musyawarah desa. Sedang dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja.

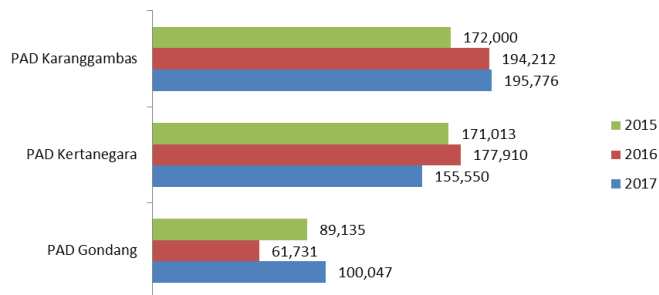
Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran perwakilan SKPD teknis dalam musrenbangdes. Sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih anggaran dalam satu kegiatan. Hanya saja, pada saat musrenbangdes, perwakilan SKPD tidak membawa catatan kegiatan apa saja yang akan didanai di Desa pada tahun yang akan datang yang bersumber dari dana APBD maupun APBN.

Di beberapa lokasi pembangunan jalan Desa swadaya tenaga masyarakat cukup besar. Mereka menyiapkan badan jalan agar siap dilaksanakan pekerjaan fisik. Tetapi jika pelaksanaan pekerjaan fisik berlangsung, menurut penuturan Kades dan Tim Pengelola Desa Gondang, Karanggambas dan Kertanegara kesadaran swadaya upah dan tenaga masyarakat kurang. Paradigma swadaya sudah mulai terkikis, masih ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa biaya pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa semakin meningkat. Setiap pekerjaan yang bisa dikerjakan masyarakat seperti pekerjaan talud, bangunan gedung, jembatan sederhana, jalan beton, jalan macadam dll selalu melibatkan masyarakat. Kecuali untuk pekerjaan jalan aspal, Desa Gondang menggunakan pihak ketiga. Desa Karanggambas dan Desa kertanegara tenaga ahli kicir aspal dari luar desa, sedang tenaga hampar agregat dari dalam desa.

Kelompok masyarakat penerima manfaat semakin meningkat jumlahnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat secara langsung masyarakat mendapatkan upah saat mereka bekerja dalam pembangunan infrastruktur. Sedangkan tidak langsung dengan dibangunnya jalan, akan mempermudah dan mempercepat waktu akses, memperlancar kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Semakin infrastruktur jalan dalam kondisi baik, maka pergerakan transportasi di desa semakin lancar. Untuk harga tanah di sepanjang jalan dan sekitarnya juga menjadi mahal, hal ini diperkuat dengan pendapat masyarakat sekitar. Khusus pekerjaan aspal, karena masyarakat setempat belum ada yang ahli masak dan kicir aspal, maka tenaga kerjanya didatangkan seluruhnya dari luar Desa.

Terkait peningkatan pendapatan asli desa (PAD), selama kurun waktu 3 tahun adanya Dana Desa (2015-2017) masih belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD seperti terlihat pada Gambar 9. Hal ini masih terkendala dengan rendahnya kreatifitas dan pengetahuan pemdes dan masyarakat dalam mengelola BUMDes. Selama TA 2015, 2016, 2017 pemdes sangat minim dalam menganggarkan untuk BUMDes, bahkan Desa Karanggambas sama sekali tidak menganggarkan karena masih kebingungan terkait usaha BUMDes.



Sumber: Hasil analisis, 2019

Gambar 9. Kondisi Pendapan Asli Desa Tahun 2015, 2016 dan 2017 (Juta)

3.5. Analisis Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dengan Dana Desa

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terkait pemeliharaan jalan Desa, hampir semua jalan desa yang sudah rusak tidak dilakukan pemeliharaan oleh masyarakat dan desa. Terkesan jalan dibiarkan begitu saja, hal ini terlihat dengan banyaknya rumput tumbuh di bahu jalan sampai tepi jalan juga tertutup rumput. Jalan Desa Gondang lebih parah lagi, di tengah tengah perkerasan jalan aspal sudah mulai tumbuh rumput. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak merasa memiliki jalan dan rendahnya partisipasi masyarakat terkait tanggungjawab memelihara jalan yang sudah terbangun sebagaimana tertuang dalam Tabel 9.

Tabel 8. Pemeliharaan Infrastruktur Dana Desa di Desa Gondang, Desa Kertanegara dan Desa Karanggambas

Pertanyaan	Gondang	Kertanegara	Karanggambas
Setelah selesai pelaksanaan kita masuk ke pemeliharaan adakah Tim Pemeliharaan	"Ada tapi tidak berjalan" "Ya tidak berjalan, kadang-kadang kan ada yang berlubang, terus mengadu ke saya, yang menjadi tim pengelola itu siapa, bukan bertumpu sama kades, disitukan sudah ada SK, tiap tiap yang di kukuhkan kan menerima SK" ¹	"Sejauh ini belum ada, masih mengandalkan desa, semua sudah terbangun tinggal pemeliharaan, masa rabat mau di tutup rabat lagi kan tinggal di tutup semen .sejauh ini masyarakat belum terlibat, yang terakhir kemarin begini paket dari kita ada unsur Swadaya sesuai visi dari rabat itu kan tinggal di siram semen terus di gosok. Inisiatif masing-masing wilayah mereka minta semen terus di aci di guyur semen terus di sabet.meminta matrial yang saat itu sedang ada pembangunan" ²	"Dari masyarakat si nggak ada tapi dari desa, nggak ada tim pemelihara tapi kalau ada yang urgen biasanya memperbaiki" ¹ "Tidak ada, ya kalau mau di hitung si kalau bentengnya gugur ya masyarakat secara pribadi spontanitas memperbaiki" ³

Sumber: Hasil analisis, 2019

Keterangan:

¹ Anggota LKMD Desa Gondang, 20 Oktober 2018

² Kepala Desa Kertanegara, 13 Oktober 2018

³ Ketua BPD Desa Karanggambas, 13 Oktober 2018

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan infrastruktur jalan desa terkait dengan pendanaan dana di Desa Gondang, Desa Karanggambas dan Desa Kertanegara dari sisi manfaat sudah sangat dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur untuk menopang perekonomian masyarakat, hanya saja dalam implementasi pelaksanaannya belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil, dikarenakan ada beberapa hal yang masih memiliki kendala yakni kualitas pelaksanaan jalan yang rendah sehingga tidak memenuhi masa yang cukup panjang tidak lebih dari satu/dua tahun jalan aspal tersebut rusak, minimnya media sosialisasi yang dilakukan oleh Desa, belum berfungsinya pelaku pengelola Dana Desa secara optimal terlebih Desa Gondang yang masih didominasi Kepala Desa, pelaksanaan pekerjaan jalan aspal masih ada yang di pihak ketiga-kan, paradigma swadaya sudah mulai terkikis, kualitas SDM pelaku desa yang masih rendah terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur jalan desa, dan belum adanya kreatifitas Desa untuk membuat BUMDes dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Mengingat penelitian ini menggunakan studi kasus, peneliti menyadari bahwa terdapat pendekatan-pendekatan yang mungkin tidak ditemui pada kasus lain sehingga hasilnya belum dapat digeneralisir. Kondisi tersebut terkait dengan tipologi kawasan desa dan sumber daya manusia pelaku Dana Desa dan masyarakat. Sehingga beberapa kondisi infrastruktur bisa berbeda dengan daerah lain. Ke depan perlu dikembangkan penelitian evaluasi lanjutan dalam upaya peningkatan pelaksanaan Dana Desa agar sesuai tujuan dan aturan yang ada dengan penambahan variabel kegiatan desa berdasar potensi desa, efektifitas Pendampingan

Dana Desa (dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa), penentuan jenis konstruksi jalan desa yang tepat, pengaruh infrastruktur desa terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dll sehingga dana desa benar benar digunakan secara benar untuk kesejahteraan masyarakat.

5. PERNYATAAN RESMI

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas segala dukungan yang diberikan selama Penulis melaksanakan tugas belajar sehingga terselesaikannya penelitian ini.

6. REFERENSI

- Agustin, A., Sjamsuddin, S., & Pratiwi, R. N. (2015). Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 735-739.
- Direktorat Jenderal Bina Marga No. 018/T/BNK/1990 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota (1990).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa, 125.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2011). Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2011*.
- Milanti, S. (2016). *Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Pemdes Wonosobo. (17 April 2009). [Http://pemdeswonosobo.blogspot.com/2009/04/alokasi-dana-desa.html](http://pemdeswonosobo.blogspot.com/2009/04/alokasi-dana-desa.html).
- Permendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (2014).
- Bappelitbangda Purbalingga. (2017). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga*.
- BPS Purbalingga. (2018). *Kecamatan Karangreja Dalam Angka 2018*.
- BPS Purbalingga. (2018). *Kecamatan Kertanegara Dalam Angka 2018*.
- BPS Purbalingga. (2018). *Kecamatan Padamara Dalam Angka 2018*.
- Sanusi, Paranoan, D., & Djumlani, A. (2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *EJournal Administrative Reform*, 2014, 2 (3): 1732-1745 ISSN 2338-7637, *Ar.Mian.Fisip-Unmul.Ac.Id*.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Suparman, Kusnadi, D., & Haryono, D. (2014). Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*.
- Teraik Kogoya, Benu Olfie, dan O. E. L. (2015). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 15.
- Wantona, S. (25 oktober 2017). [Http://aceh.tribunnews.com/2017/10/25/jalan-baru-pembangunan-desa.html](http://aceh.tribunnews.com/2017/10/25/jalan-baru-pembangunan-desa.html).
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).